

KONDISI TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH

THE CONDITION OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING LABOUR 2020 IN CENTRAL JAVA PROVINCE

Ahmad Zaenun Faiz

Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pemuda No.127-133, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132

zaenun.faiz@gmail.com

ABSTRAK

Pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan 4.608.261 jiwa penduduk menggantungkan hidupnya di sektor ini. Meski menyandang predikat sebagai sektor dengan PDRB Jawa Tengah terbesar ketiga di tahun 2020, sektor ini menempati posisi 6 terbawah sebagai sektor lapangan usaha yang rendah produktivitas per kapitanya. Permasalahan ini dapat dilihat dari beberapa aspek ketenagakerjaan seperti usia, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan jenis dan status pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjabarkan mengenai kondisi tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menganalisis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2016-2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa kondisi seperti okupasi demografis yang didominasi oleh penduduk usia tua, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan struktur sistem pertanian yang masih bersifat subsisten mengakibatkan produktivitas perkapita di sektor ini tergolong rendah.

Kata Kunci: tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, sakernas

ABSTRACT

Agriculture, forestry and fishing is the highest workforce in Central Java Province with 4,608,261 people work in it. Despite being the third highest GDRP in Central Java Province 2020, this sector is ranked bottom sixth on productivity per capita. This issue can be seen from several aspects of employment such as the age of the workforce, education level, and type and status of work. This study using qualitative descriptive method to explain the condition of agriculture, forestry and fishing labour in Central Java Province by analysing National Workforce Survey (Sakernas) for the period of August 2016-2020. The result show that several conditions such as ageing workforce, lower education labour and subsistence agriculture dominant-farming system conduce the productivity per capita is low.

Keywords: labour, agriculture, forestry, fishing, sakernas

PENDAHULUAN

Pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, sebanyak 4.608.261 jiwa penduduk bekerja di sektor ini dengan rincian 2.834.288 jiwa adalah penduduk laki-

laki dan 1.773.973 jiwa adalah penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020). Di tahun 2020, sektor ini menjadi sektor dengan sumbangan PDRB terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 192.888,91 miliar rupiah atau 15,13% dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah, di bawah sektor industri pengolahan dengan nilai 465.494,34 miliar

rupiah atau 34,69% dari total PDRB (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor lapangan usaha yang signifikan di Provinsi Jawa Tengah meski mengalami penurunan tenaga kerja. Tercatat setidaknya ada 4.608.261 jiwa penduduk yang bekerja di sektor ini di tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 17,95% dari kondisi di tahun 2010 dengan jumlah tenaga kerja saat itu sebanyak 5.616.529 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020).

Guna melihat perkembangan sektor lapangan usaha yang ada di Provinsi Jawa Tengah, analisis *location quotient* (LQ) digunakan untuk menganalisis keunggulan komparatif di setiap sektor. Jika suatu sektor lapangan usaha memiliki nilai indeks LQ di atas angka 1,00 menandakan bahwa sektor tersebut tergolong dalam sektor basis, yakni sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Hasilnya tidak hanya memenuhi wilayah terkait saja namun dapat pula diekspor ke wilayah lain (Jumiyanti & Kalzum, 2018).

Tabel 1. Indeks *Location Quotient* (LQ) Berdasarkan PDRB Harga Tetap Provinsi Jawa Tengah Dan PDB Harga Tetap Nasional Tahun 2010

Sektor ¹	PDRB (miliar)	PDB (miliar)	Indeks LQ	Rank
1	86.372,01	985.143,60	1,267	1
2	4.302,56	716.391,20	0,046	9
3	146.155,16	1.594.330,40	0,702	4
4	4.645,50	50.042,20	0,711	3
5	27.124,58	660.967,50	0,314	7
6	86.998,32	881.108,50	0,756	2
7	26.298,75	417.466,00	0,483	6
8	15.899,73	462.788,80	0,263	8
9	46.599,87	654.680,00	0,545	5

Sumber: Badan Pusat Statistik (2011) diolah

Di tahun 2010, pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan satu-satunya sektor basis di Provinsi Jawa Tengah. Mengacu pada tabel 1, sektor ini memiliki nilai indeks LQ sebesar 1,267 yang menunjukkan produksi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah dapat memenuhi kebutuhan

dalam wilayah serta dapat diekspor ke wilayah lain (Badan Pusat Statistik, 2011).

Di tahun 2020, nilai keunggulan komparatif di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tabel 2 turun menjadi 1,072, jauh di bawah sektor industri pengolahan yang memiliki nilai indeks LQ 1,614 dan sektor pendidikan dengan nilai indeks LQ 1,397. Munculnya kawasan-kawasan industri baru di Provinsi Jawa Tengah pada rentang waktu 2010-2020 seperti Kawasan Industri Batang, Kawasan Industri Kendal, *Jatengland Industrial Park* Sayung serta kawasan-kawasan industri lainnya menjadikan pertumbuhan sektor industri pengolahan tumbuh jauh lebih cepat ketimbang dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan kawasan industri yang cukup pesat di Provinsi Jawa Tengah ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Perkembangan industri yang pesat ini dapat mengakibatkan berkurangnya lahan produktif untuk pertanian, kehutanan dan perikanan dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri (Hasang, 2019).

Meski secara umum nilai PDRB di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 86.371,02 miliar rupiah menjadi 192,888,91 miliar rupiah di tahun 2020, kondisi keunggulan komparatif dan tenaga kerja di sektor ini justru menunjukkan penurunan. Berbeda dengan sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan yang cukup cepat dari 146.155,16 miliar rupiah di tahun 2010 menjadi 465.494,34 miliar rupiah di tahun 2020 dengan peningkatan PDRB sebesar 218,49% (Badan Pusat Statistik, 2021). Meski masih tergolong dalam sektor basis, keunggulan komparatif sektor ini di tahun 2020 turun dan berada pada posisi ketiga tertinggi di bawah sektor industri pengolahan dan pendidikan.

¹ Klasifikasi sektor pada tabel 1 berdasarkan KLUI-1990

1 Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
2 Pertambangan dan penggalan
3 Industri pengolahan
4 Listrik, gas, dan air bersih

5 Konstruksi
6 Perdagangan, hotel, dan restoran
7 Pengangkutan dan komunikasi
8 Keuangan, real estat, dan jasa perusahaan
9 Jasa-jasa

**Tabel 2. Indeks *Location Quotient* (LQ)
Berdasarkan PDRB Harga Tetap Provinsi
Jawa Tengah Dan PDB Harga Tetap
Nasional Tahun 2020**

Sektor ²	PDRB (miliar)	PDB (miliar)	Indeks LQ	Rank
A	192.888,91	1.378.131,30	1,072	3
B	33.082,76	790.475,20	0,321	16
C	465.494,34	2.209.920,30	1,614	1
D	1.309,59	108.826,40	0,092	18
E	855,45	9.449,30	0,694	11
F	142.205,67	1.072.334,80	1,016	5
G	181.852,59	1.386.695,40	1,005	6
H	29.832,20	393.481,90	0,581	14
I	40.359,71	299.248,00	1,033	4
J	57.428,84	651.930,90	0,675	12
K	40.219,25	457.482,00	0,674	13
L	23.010,53	324.259,40	0,544	15
MN	5.417,73	195.671,10	0,212	17
O	36.457,41	365.440,90	0,764	9
P	63.862,38	350.329,80	1,397	2
Q	13.658,16	142.309,70	0,735	10
RSTU	20.664,88	196.608,70	0,805	8

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021) diolah

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 di bidang ketenagakerjaan, terdapat tiga indikator kinerja program yang memiliki status merah yang menandakan perlunya upaya keras dalam mencapai indikator capaian tersebut. Indikator tersebut antara lain (1) tingkat partisipasi angkatan kerja, (2) rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dan (3) produktivitas tenaga kerja (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019). Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kecenderungan tingkat produktivitas per kapita tenaga kerja terhadap PDRB yang rendah (Rahman & Octaviani, 2020). Meski nilai kontribusi PDRB-nya berada di posisi tertinggi kedua (15,13% dari total PDRB), PDRB per

tenaga kerja pada tabel 3 hanya menduduki di angka Rp41.857.201 per tahun atau Rp3.488.100 per bulan – peringkat 12 dari 17 sektor lapangan usaha berdasarkan KBLI-2020.

**Tabel 3. Produktivitas Per Kapita
Berdasarkan PDRB Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2020**

Sektor ²	PDRB (miliar)	Tenaga Kerja	Produktivitas Tahunan (PDRB/TK)	Rank
A	Rp 192.888,91	4.608.261	Rp 41.857.201,66	12
B	Rp 33.082,76	109.348	Rp 302.545.634,12	3
C	Rp 465.494,34	3.620.147	Rp 128.584.375,16	5
D	Rp 1.309,59	52.884	Rp 24.763.444,52	16
E	Rp 855,45	46.888	Rp 18.244.540,18	17
F	Rp 142.205,67	1.404.435	Rp 101.254.718,09	7
G	Rp 181.852,59	3.337.438	Rp 54.488.679,64	11
H	Rp 29.832,20	517.721	Rp 57.622.155,56	10
I	Rp 40.359,71	1.314.912	Rp 30.693.848,71	13
J	Rp 57.428,84	70.833	Rp 810.763.909,48	2
K	Rp 40.219,25	201.778	Rp 199.324.257,35	4
L	Rp 23.010,53	13.576	Rp 1.694.941.809,07	1
MN	Rp 5.417,73	195.696	Rp 27.684.418,69	14
O	Rp 36.457,41	318.763	Rp 114.371.523,67	6
P	Rp 63.862,38	702.411	Rp 90.918.821,03	8
Q	Rp 13.658,16	231.438	Rp 59.014.336,45	9
RSTU	Rp 20.664,88	790.406	Rp 26.144.639,59	15

sumber: Badan Pusat Statistik (2020 & 2021) diolah

Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis data statistik tentang ketenagakerjaan, terutama di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang digunakan untuk menjawab kondisi perkembangan sektor lapangan usaha tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan mengolah data statistik kondisi ketenagakerjaan menggunakan data sekunder hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus tahun 2016-2020 dan data *Indonesia's Occupational Employment Outlook 2020*.

² Klasifikasi sektor pada tabel 2 dan 3 berdasarkan KBLI-2020

- A Pertanian, kehutanan dan perikanan
- B Pertambangan dan penggalan
- C Industri pengolahan
- D Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
- E Treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi
- F Konstruksi
- G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- H Pengangkutan dan pergudangan
- I Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

- J Informasi dan komunikasi
- K Aktivitas keuangan dan asuransi
- L Real estate
- MN Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya
- O Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- P Pendidikan
- Q Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial
- RSTU Aktivitas jasa lainnya;

Teknis pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan menggunakan *software* Microsoft Excel dan Tableau. Analisis hasil olahan data ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram disertai penjelasan secara deskriptif. Data yang olah dan dianalisis antara lain data ketenagakerjaan di setiap sektor lapangan usaha berdasarkan golongan umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jabatan pekerjaan, dan jenis dan status pekerjaan utama.

Sektor dan kodifikasi lapangan kerja mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI-2020), hasil ratifikasi dari *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4* (ISIC-4) yang diterbitkan oleh *Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat* (UN DESA). Klasifikasi baku pada ISIC-4 ini membagi macam-macam sektor lapangan usaha menjadi 21 golongan pokok lapangan usaha yang kemudian disederhanakan menjadi 17 golongan pokok lapangan usaha pada KBLI-2020.

Kodifikasi jabatan pekerjaan mengacu pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 (KBJI-2014), hasil ratifikasi *International Standard Classification of Occupation 2008* (ISCO-08) yang diterbitkan oleh *International*

Labour Office (ILO). Klasifikasi jabatan ini dibagi menjadi 10 golongan pokok jabatan.

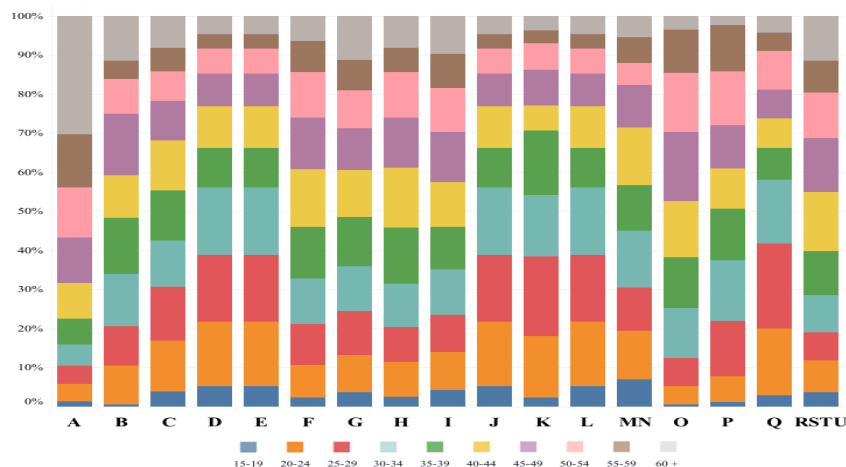
Klasifikasi pendidikan menggunakan Sistem Pendidikan Nasional yang mengacu pada *International Standard Classification of Education 2011* (ISCED-11) yang diterbitkan oleh *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Klasifikasi status pekerjaan mengacu pada *International of Status in Employment 1993* (ICSE-93) yang diadopsi pada *International Conference of Labour Statisticians ke-5* pada bulan Januari 1993.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia Tenaga Kerja

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor paling rentan kehilangan tenaga produktifnya (Setiawan, 2019). Tenaga kerja di sektor ini didominasi oleh penduduk dengan usia 60 tahun ke atas dengan nilai proporsi sebesar 32,36% dari total tenaga kerjanya. Dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, terlihat dari gambar 1 bahwa sektor ini memiliki tenaga kerja usia tua paling tinggi dan tenaga kerja usia muda yang relatif rendah.



Gambar 1. Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi Berdasarkan Usia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tren pertumbuhan tenaga kerjanya pada 5 tahun terakhir, terlihat pada tabel 4 umumnya sebagian besar tenaga kerja di sektor ini mengalami penurunan tenaga kerja, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami tren

peningkatan tenaga kerja pada semua kelompok usia dan jenis kelamin. Kondisi demikian terjadi karena adanya efek dari peristiwa pandemi covid-19 yang merebak sekitar awal Maret 2020 sehingga berimbas pada beralihnya tenaga kerja dari sektor lain mengingat Survei

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ini dilakukan pada bulan Agustus 2020.

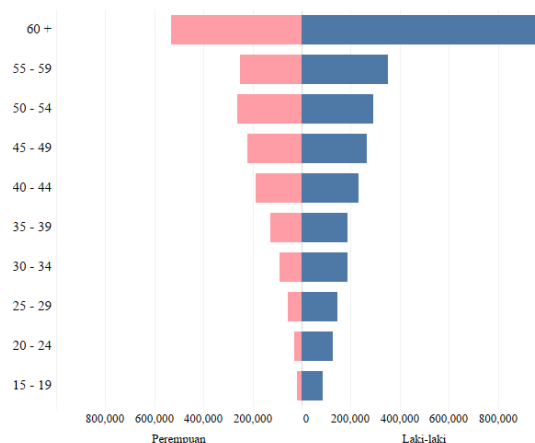
Tabel 4. Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin Di Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2020

Umur	Laki-laki				
	2016	2017	2018	2019	2020
15 - 19	95.528	73.841	51.878	50.396	86.158
20 - 24	204.484	108.087	155.926	101.067	127.456
25 - 29	206.664	148.354	139.083	137.677	144.568
30 - 34	189.804	176.967	149.483	148.828	188.859
35 - 39	221.259	224.360	165.909	158.466	188.729
40 - 44	249.424	211.056	201.368	202.944	231.372
45 - 49	310.991	275.995	257.498	232.805	264.897
50 - 54	371.297	293.040	288.932	289.919	290.795
55 - 59	389.180	367.869	328.308	346.902	350.199
60 +	860.910	814.978	843.925	905.783	961.255
TOTAL	3.099.541	2.694.547	2.582.310	2.574.787	2.834.288

Umur	Perempuan				
	2016	2017	2018	2019	2020
15 - 19	16.483	9.554	8.878	9.800	19.851
20 - 24	57.347	33.259	27.038	25.489	30.976
25 - 29	71.998	53.416	55.630	41.632	57.599
30 - 34	74.398	81.638	78.774	62.783	88.072
35 - 39	183.427	151.450	117.369	117.986	128.718
40 - 44	227.248	179.265	181.382	163.219	185.966
45 - 49	247.061	237.434	232.367	196.221	220.913
50 - 54	300.925	264.398	243.692	228.446	261.328
55 - 59	312.233	238.485	242.171	236.537	250.353
60 +	477.230	380.547	434.638	437.775	530.197
TOTAL	1.968.350	1.629.446	1.621.939	1.519.888	1.773.973

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2016-2020, Badan Pusat Statistik diolah

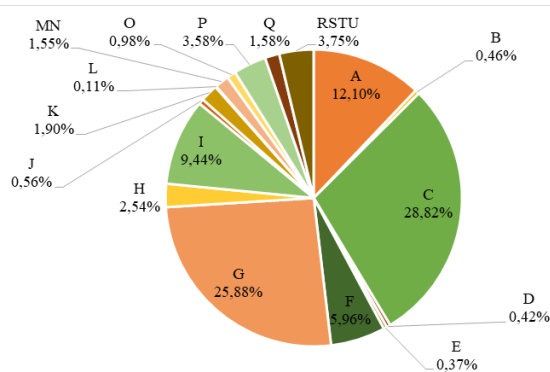
Dilihat secara demografis, sebaran tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih terlihat cukup kentara (Waris, Nirmala, & Kumar, 2015). Secara komposisi berdasarkan kelompok usia di gambar 2, tenaga kerja di sektor ini didominasi oleh usia diatas 60 tahun dengan tenaga kerja laki-laki jumlahnya lebih besar ketimbang perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya segregasi *gender* bahwa anggapan laki-laki memiliki tenaga lebih kuat serta peran wanita lebih ke mendukung pekerjaan laki-laki sehingga komposisi tenaga kerja laki-laki lebih dominan dalam mengolah lahan pertanian (Iorga, 2017).



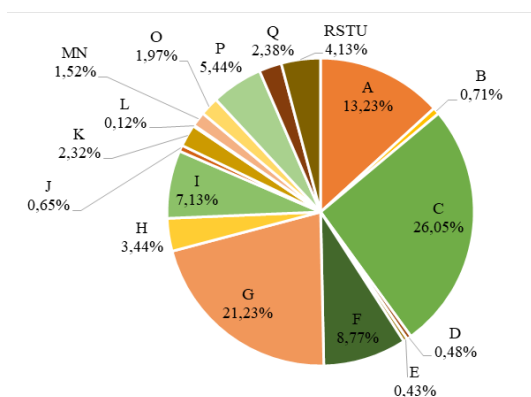
Gambar 2. Piramida Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Tenaga kerja usia muda memiliki kecenderungan untuk berpindah pekerjaan ke sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan secara status dan pendapatan (Athauda, Dissanayake, & Anjalee, 2015). Jumlah tenaga kerja usia muda pada gambar 2 (15-19, 20-24,

25-29, dan 30-34) di sektor ini tercatat kurang dari 200.000 jiwa baik laki-laki maupun perempuan. Okupasi tenaga kerja usia muda di Provinsi Jawa Tengah paling tinggi pada gambar 3 dan 4 mengisi pada sektor C – Industri pengolahan dengan persentase 28,82% untuk kelompok usia 15-24 dan 26,05% untuk kelompok usia 25-34 tahun disusul dengan sektor G – Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan nilai persentase 25,88% pada kelompok usia 15-24 tahun dan 21,23% pada kelompok usia 25-34 tahun.



Gambar 3. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Pada Usia 15-24



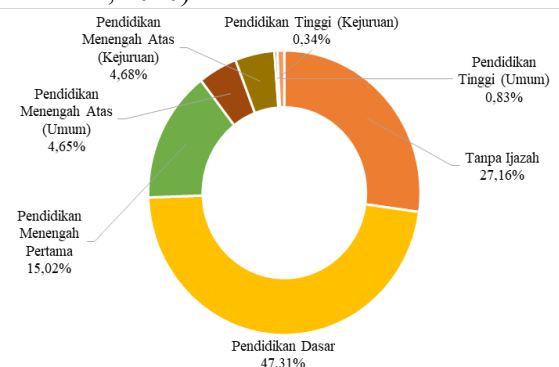
Gambar 4. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Pada Usia 25-34

Tingkat Pendidikan dan Prospek Pekerjaan

Mengacu pada standar internasional tentang klasifikasi pendidikan 2011 (*International Standard Classification of Education 2011/ISCED-11*) yang diterbitkan oleh UNESCO, jenis orientasi pendidikan formal terbagi menjadi dua jenis yakni

pendidikan kejuruan dan umum. Pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai program pendidikan yang didesain untuk menggali pengetahuan, keahlian dan kompetensi spesifik guna mengisi pangsa pasar tenaga kerja pada lapangan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan pendidikan kejuruan, pendidikan umum tidak didesain untuk mengisi pasar kerja lapangan pekerjaan tertentu melainkan program ini didesain untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan kompetensi serta kemampuan literasi dan numerik guna mengembangkan khasanah perkembangan pengetahuan dan keilmuan (UNESCO, 2011).

Okupasi tenaga kerja pada gambar 5 di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mayoritas berada pada kategori pendidikan dasar, disusul dengan tanpa ijazah pendidikan formal dan pendidikan menengah pertama. Tenaga kerja yang memiliki orientasi pendidikan (pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi), baik pendidikan kejuruan ataupun pendidikan umum masih dibawah angka 15%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas tenaga kerja di sektor ini sebagian besar tidak memiliki keahlian, keterampilan maupun kompetensi khusus sehingga imbasnya dapat memengaruhi pada lambatnya perkembangan inovasi di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan (Rahman & Octaviani, 2020).



Gambar 5. Okupasi Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan 2020 Di Provinsi Jawa Tengah

Dilihat dari rata-rata lama kerja dan penghasilan pada tabel 5, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan lama jam kerja dan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga

kerja dengan pendidikan yang lebih rendah. Kemudian jika ditinjau dari prospeknya, tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi membuka prospek jenis pekerjaan yang lebih luas dibandingkan dengan tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih rendah (Athauda, Dissanayake, & Anjalee, 2015). Mengacu pada tabel 5, tenaga kerja dengan (1) Pendidikan Tinggi (Umum) bisa menempati keseluruhan 26 jenis pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) Pendidikan Tinggi (Kejuruan) bisa menempati 22 jenis pekerjaan; (3) Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan) bisa menempati 22 jenis pekerjaan; (4) Pendidikan Menengah Atas (Umum) bisa menempati 14 jenis pekerjaan; (5) Pendidikan Menengah Pertama bisa menempati 14 jenis pekerjaan; (6) Pendidikan Dasar bisa menempati 6 jenis pekerjaan; dan (7) Tanpa Ijazah bisa menempati 6 jenis pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang kerja dan gaji yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih rendah.

Tabel 5. Jumlah Tenaga Kerja, Rerata Lama Kerja Dan Penghasilan Pekerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah Tenaga Kerja	Rerata	
		Lama kerja*	Penghasilan**
Tanpa Ijazah	1.251.591	33	1.312.763,50
Pendidikan Dasar	2.180.312	38	1.674.550,00
Pendidikan Menengah Pertama	692.214	39	1.878.348,00
Pendidikan Menengah Atas (Umum)	214.373	42	2.352.616,00
Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)	215.888	41	2.292.474,00
Pendidikan Tinggi (Kejuruan)	15.696	44	3.265.133,00
Pendidikan Tinggi (Umum)	38.187	41	5.251.688,00
TOTAL	4.608.261	39	1.907.188,00

*lama kerja selama 1 minggu **penghasilan selama 1 bulan

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2020, Badan Pusat Statistik diolah

Mengacu pada laporan *Indonesia's Occupational Employment Outlook 2020*, sebagian besar jabatan-jabatan pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki prospek yang suram. Dari total 26 jenis subgolongan jabatan pekerjaan yang

berkaitan dengan sektor ini, hanya ada satu jenis subgolongan jabatan pekerjaan yang memiliki prospek cerah yaitu 9214 – Buruh Kebun Bibit dan Taman. Kemudian dari 15 besar subgolongan jabatan pekerjaan dengan jumlah lowongan terbanyak dan 15 besar jabatan pekerjaan yang paling dicari oleh perusahaan, tidak ada satupun dari subgolongan jabatan tersebut yang terkait dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (The World Bank, Bappenas RI & Pemerintah Australia, 2020). Rendahnya prospek kerja di sektor inilah yang membuat pekerjaan di sektor ini kurang diminati oleh tenaga kerja usia muda. Di samping produktivitasnya yang rendah jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, prospek kedepannya juga kurang menjanjikan sehingga tenaga kerja usia muda lebih memilih bekerja pada jenis-jenis subgolongan jabatan yang menjanjikan di sektor lain. Kondisi ini yang kemudian mengakibatkan nilai keunggulan komparatif sektor pertanian, kehutanan dan pertanian di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2010 ke tahun 2020.

Jenis dan Status Pekerjaan

Mengacu pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia tahun 2014 atau yang dikenal sebagai KBJI-2014 yang membagi macam-macam jenis pekerjaan menjadi 10 golongan pokok jabatan pekerjaan, data ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 pada gambar 6 menunjukkan bahwa 97,43% tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bekerja pada golongan pokok 6 – Pekerja terampil pertanian, kehutanan dan perikanan. Komposisi terbesar kedua ada pada golongan pokok 7 – Pekerja produksi, operator dan pekerja kasar yang hanya menempati 1,04%.

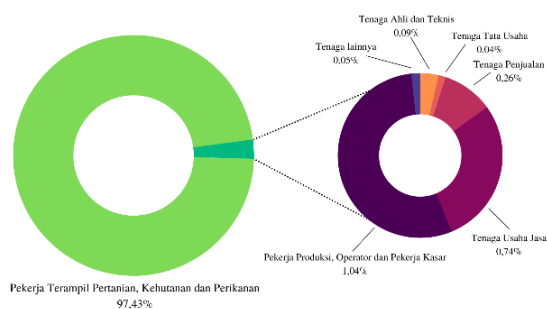
Berdasarkan status pekerjaannya, Badan Pusat Statistik secara umum membagi menjadi 4 kategori status pekerjaan yakni (1) Berusaha – seseorang yang mengusahakan aktivitas ekonominya berdasarkan aset dan properti yang dimilikinya; (2) Buruh – seseorang yang bekerja dibayar pada suatu badan usaha sebagai pekerja tetap; (3) Pekerja bebas – seseorang yang bekerja dibayar pada suatu badan usaha

Tabel 6. Prospek Industri Dan Pendidikan Minimum Jenis-Jenis Pekerjaan Berdasarkan KBJI-2014 Terkait Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Di Indonesia

KBJI	Nama Subgolongan Jabatan	Prospek	Pendidikan minimum
1311	Manajer Produksi Pertanian dan Kehutanan	↓ Suram	Pendidikan Tinggi (Umum)
1312	Manajer Produksi Penangkapan dan Budidaya Ikan	↓ Suram	Pendidikan Tinggi (Umum)
2132	Penasihat Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	↓ Suram	Pendidikan Tinggi (Umum)
2250	Dokter Hewan	↓ Suram	Pendidikan Tinggi (Umum)
3142	Teknisi Pertanian	→ Stabil	Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)
3143	Teknisi Kehutanan	↓ Suram	Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)
3240	Teknisi dan Asisten Kedokteran Hewan	↓ Suram	Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)
6111	Pekerja Pertanian Tanaman Pangan dan Tanaman Semusim	↓ Suram	Pendidikan Menengah Pertama
6112	Pekerja Pertanian Tanaman Tahunan dan Tanaman Semak	↓ Suram	Pendidikan Menengah Pertama
6113	Pekerja Pertanian Tanaman Kebun Bibit dan Tanaman Taman	↓ Suram	Pendidikan Menengah Pertama
6114	Pekerja Pertanian Tanaman Campuran (Tumpang Sari)	↓ Suram	Pendidikan Menengah Pertama
6121	Pekerja Peternakan Hewan Besar dan Kecil Serta Penghasil Susu	→ Stabil	Pendidikan Menengah Pertama
6122	Pekerja Peternakan Unggas	↓ Suram	Pendidikan Menengah Pertama
6130	Pekerja Campuran Pertanian dan Peternakan	↓ Suram	Pendidikan Menengah Pertama
6221	Pekerja Peternakan Hewan Besar dan Kecil Serta Penghasil Susu	↓ Suram	Pendidikan Menengah Pertama
7511	Pemotong Hewan, Penjual Ikan Segar, dan Pengolah Makanan YBDI	N/A	Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)
7512	Pembuat Roti, Kue, dan Kembang Gula	N/A	Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)
7513	Pembuat Produk Susu	↓ Suram	Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)
7514	Pengawet Buah, Sayur, dan YBDI	N/A	Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)
7515	Ahli Pencicip dan Penilai Kualitas Makanan dan Minuman	→ Stabil	Pendidikan Menengah Atas (Kejuruan)
9211	Buruh Pertanian	N/A	Tanpa Ijazah
9212	Buruh Peternakan	N/A	Tanpa Ijazah
9213	Buruh Campuran Pertanian dan Peternakan	N/A	Tanpa Ijazah
9214	Buruh Kebun Bibit dan Taman	↑ Cerah	Tanpa Ijazah
9215	Buruh Kehutanan	→ Stabil	Tanpa Ijazah
9216	Buruh Penangkapan dan Budidaya Perikanan	↓ Suram	Tanpa Ijazah

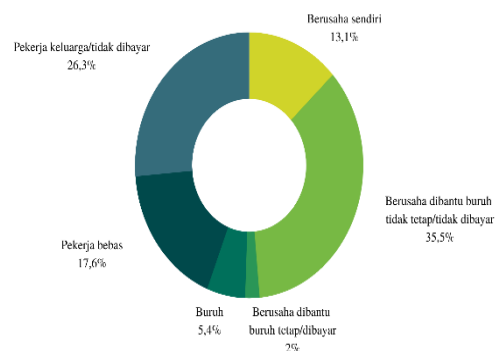
Sumber: *Indonesia's Occupational Employment Outlook 2020*, The World Bank, Bappenas RI & Pemerintah Australia diolah

sebagai pekerja tidak tetap; dan (4) Pekerja keluarga/tidak dibayar – seseorang yang bekerja tidak dibayar. Poin (1) memiliki 3-sub kategori yakni (i) berusaha sendiri; (ii) berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan (iii) berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, dan poin (2) memiliki 2 sub-kategori yakni (iv) buruh/karyawan/pegawai dan (v) pekerja bebas (Badan Pusat Statistik, 2011).



Gambar 6. Proporsi Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah 2020 Berdasarkan Golongan Pokok Jabatan Pekerjaan

Kondisi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa status pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini sebagian besar adalah kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 35,5% disusul dengan kelompok pekerja keluarga/tidak dibayar dengan proporsi 26,3%.



Gambar 7. Proporsi Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah 2020 Berdasarkan Status Pekerjaan

Status pekerjaan yang bersifat sukarela dan tidak memiliki imbal jasa berupa upah

ataupun gaji secara jelas dikenal sebagai sektor informal (Satriawan, 2021). Melihat struktur status pekerjaan pada gambar 7, kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan pekerja keluarga/tidak dibayar ini menunjukkan bahwa pertanian-pertanian yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar masih berupa pertanian keluarga. Dominasi status pekerjaan yang banyak diisi oleh kelompok berusaha dibantu buruh tidak dibayar dan kelompok pekerja keluarga/tidak dibayar ini menunjukkan bahwa status kerja di sektor ini didominasi oleh sektor informal.

Aktivitas pertanian sendiri secara umum terbagi menjadi dua dikotomi yakni pertanian subsisten yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga, dan pertanian komersil yang berorientasi produksi untuk memenuhi *supply* pasar (Bisht, et al., 2014). Pada sistem pertanian subsisten, kepala keluarga biasanya adalah sebagai pemilik aset dan properti lahan pertanian, baik berupa sawah, tegalan, hutan, kebun ataupun kapal yang pengelolaannya dibantu oleh anak, istri atau saudara sebagai pekerja keluarga (Kachroo, et al., 2016). Struktur status pekerjaan yang didominasi oleh sektor informal di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkembang sebagian besar masih berupa pertanian subsisten karena arah pengolahan lahan pertanian lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ketimbang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sistem pembagian hasil yang didapatkan pada pertanian subsisten dari hasil panen komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan ini sebagian besar berupa bagi hasil antara petani pemilik lahan dan petani penggarap.

Tabel 7. Tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir

Tahun	Berusaha	Pekerja Dibayar	Pekerja Tak Dibayar
2016	2.510.339 	1.124.455 	1.433.097 
2017	2.170.667 	1.066.963 	1.086.363 
2018	2.147.557 	977.424 	1.079.268 
2019	2.166.085 	927.280 	1.001.310 
2020	2.329.986 	1.064.290 	1.213.985 

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2016-2020, Badan Pusat Statistik diolah

Melihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir pada tabel 7, pada tahun 2016 hingga tahun 2019 semua kategori mengalami penurunan jumlah tenaga kerja kecuali pada kategori Berusaha pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan sedikit. Kemudian pada tahun 2020 saat terjadinya wabah pandemi covid-19, semua kategori status pekerjaan mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketenagakerjaan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada kondisi normal kurang diminati sehingga mengalami tren penurunan. Berbeda dengan saat kondisi pandemi covid-19 yang berimbas pada lesunya perekonomian di sektor selain pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga tenaga kerjanya mulai beralih ke sektor ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tren pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah pada saat kondisi normal memiliki kecenderungan semakin menurun jumlahnya.
2. Tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh tenaga kerja usia tua dengan persentase 32,36% tenaga kerjanya berusia lebih dari 60 tahun.
3. Penduduk usia muda kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan karena dari 26 jenis subgolongan jabatan pekerjaan yang

berkaitan dengan sektor ini, hanya ada satu jenis subgolongan jabatan pekerjaan yang memiliki prospek cerah.

4. Tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih rendah di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah memiliki peluang yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah pula dalam mengisi subgolongan jabatan tertentu dibandingkan dengan tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi.
5. Struktur status pekerjaan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah didominasi dengan tenaga-tenaga kerja di sektor informal dengan sistem pertanian subsisten.
6. Rendahnya produktivitas tenaga kerja per kapita di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah ini terjadi karena secara demografis tenaga kerjanya yang didominasi oleh penduduk usia tua, rata-rata tingkat pendidikan yang tergolong rendah, prospek kerja yang kurang menjanjikan dan struktur status pekerjaan yang didominasi oleh sektor-sektor informal.
7. Merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia yang dimulai pada bulan Maret 2020 menyebabkan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

SARAN

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh pekerja-pekerja informal. 35,5% dari total angkatan kerja di sektor ini adalah pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja informal dan jumlah pekerja informal mencapai 26,3% dari total angkatan kerja. Pekerja-pekerja informal cenderung bekerja tanpa ada kepastian kontrak ataupun jaminan-jaminan tertentu dalam bekerja. Seringkali besaran upah yang diterima juga tergantung pada kemurahan hati dari pemberi kerja. Kondisi demikian yang membuat bekerja di sektor ini kurang

menjanjikan, terutama bagi tenaga kerja usia muda.

Salah satu solusi dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan membuat kepastian hukum mengenai tata cara mempekerjakan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Regulasi serupa sebenarnya sudah ada seperti PP nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tetapi PP tersebut tidak spesifik mengatur pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Mengacu dari PP tersebut, solusi dari rendahnya kepastian hukum di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilakukan dengan menyusun sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja secara spesifik di sektor ini. Sehingga tenaga kerja terutama pekerja usia muda memiliki kepastian dalam perihal upah, waktu kerja, alih daya dan sebagainya.

Regulasi ini juga harus mengatur secara spesifik mengenai luas kepemilikan lahan petani dalam mempekerjakan tenaga kerja pertanian, kehutanan dan perikanan. Semisal petani dengan luas lahan kurang dari 1 ha tidak diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja karena luas 1 ha tidak dapat menghasilkan hasil produksi yang mencukupi untuk memberi upah yang layak bagi tenaga kerjanya. Petani dengan luas lahan 1-10 ha dapat mempekerjakan tenaga kerja paling banyak 5 tenaga kerja. Petani dengan luas lahan 10-50 dapat mempekerjakan tenaga kerja paling banyak 25 tenaga kerja dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan ini dilakukan guna melindungi petani dan pekerjaannya agar sama-sama memiliki penghasilan yang layak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Athauda, A., Dissanayake, D. K., & Anjalee, G. (2015). Problem and Prospects of Retaining Workforce in Agriculture: Case of the Sri Lankan Tea Plantation

- Sector. *IJOS: International Journal of Okinawan Studies*, 6, 105–114.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2011*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah - Agustus 2020*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2021*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Bisht, I. S., Pandravada, S. R., Rana, J. C., Malik, S. K., Singh, A., Ahmed, F., & Bansal, K. C. (2014). Subsistence Farming, Agrobiodiversity, and Sustainable Agriculture: A Case Study, Agroecology and Sustainable Food Systems. *Agroecology and Sustainable Food Systems*. 38:8, pp. 890-912. Taylor & Francis. doi:10.1080/21683565.2014.901273
- Hasang, I. (2019). Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Barru. *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2:3, 151-157.
- ILO. (2008). *International Standard Classification of Occupations*. New York: International Labour Office.
- Iorga, A. M. (2017). Characteristic of the Romanian Agriculture Workforce. *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 17, Issue 2*, pp. 183-186. Bucharest: University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest - Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.
- Jumiyanti, & Kalzum, R. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 29-43.
- Kachroo, D., Kachroo, J., Bhat, A., Thakur, N. P., Gupta, A. K., Khajurla, V., & Iqbal, M. (2016). Characterization of Farming Systems in Jammu Region of J&K State and Its Policy Implications. *African Journal of Agricultural Research*, Vol. 11(9), 783-791. doi:10.5897/AJAR2013.8286
- Kementerian Ketenagakerjaan & Badan Pusat Statistik. (2014). *Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Perda Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023*. Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- Rahman, A., & Octaviani, E. (2020). Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Kemiskinan di Indonesia. *Seminar Nasional Variansi (Venue Artikulasi-Riset, Inovasi, Resonansi-Teori, dan Aplikasi Statistika)* (pp. 39-48). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Satriawan, D. (2021). Pekerja Anak Sektor Informal di Indonesia: Situasi Terkini dan Tantangan ke Depan (Analisis Data Susenas 2019). *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 16 No. 1, 1-12.
- Setiawan, I. (2019). Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Aksara Public*, Vol. 3, No. 1, 1-18.
- The World Bank, Bappenas RI & Pemerintah Australia. (2020). *Indonesia's Occupational Employment Outlook 2020*. Jakarta: Bappenas RI.

- UN DESA. (2008). *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4*. New York: United Nation Publication.
- UNESCO. (2011). *International Standard Classification of Education*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.
- Waris, A., Nirmala, B., & Kumar, S. A. (2015). Gender Gap and Female Workforce Participation in Agriculture in Andhra Pradesh, India. *African Journal of Agricultural Research*, Vol. 11(9), 769-778. doi:10.5897/AJAR2013.7683